

PERSEPSI USER DAN PREPARER LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PELAPORAN SOSIAL PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA

Rifqi Muhammad

Universitas Islam Indonesia

e-mail: rifqimuhammad@yahoo.com

Abstract

An Islamic bank is a unique institution because they do not only focus on economic matters but also on their social roles to their society. However, their social roles might not be exposed extensively due to the lack of disclosures. Haniffa (2002) proposed Islamic Social Reporting as the alternative to fill this gap. Islamic Social Reporting is the process of identifying, providing, and communicating social and other relevant information in conformity with the spiritual need of Muslims decision makers in order to demonstrate accountability to God and community; to increase transparency of business activities toward Muslim Ummah; and to achieve Mardātillah (blessing from Allah). This study aims to investigate the users' and preparers' of financial statements of Islamic social reporting by Islamic banks in Malaysia since this country is in the forefront on the development of Islamic banking and finance. This study specifically examines the stakeholders' perceptions on two issues of Islamic Social Reporting: (a) the objectives of Islamic social reporting; and (b) the information that might be useful for the stakeholders and society. It involves some stakeholders such as Islamic banks' accountants, members of Sharī'ah Supervisory Board (SSB), Muslim accounting Academicians, and customers that are proxies by postgraduate students. This study adopts the questionnaire survey method to examine the perceptions of stakeholders. The study found that the stakeholders of Islamic banks in Malaysia have positive views on Islamic social reporting. This study may contribute to the improvement of Islamic banking reports and to increase the awareness of regulator and management of the social roles of Islamic banks particularly in Malaysia and widely practiced in the Islamic financial industry in the world.

Keywords: *Islamic banks, Islamic social reporting, Islamic accountability*

Abstrak

Perbankan Islam merupakan lembaga keuangan yang memiliki keunikan karakteristik dimana tidak sekedar memiliki tujuan ekonomi semata melainkan juga mengedepankan fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Meskipun demikian, fungsi sosial tersebut masih belum tercermin secara nyata karena lemahnya pengungkapan tentang aktivitas-aktivitas sosial yang dijalankan. Haniffa (2002) mengusulkan pelaporan aspek-aspek sosial dalam aktivitas lembaga keuangan syariah dalam perspektif Islam sebagai sebuah alternatif untuk mereduksi kelemahan dalam praktik di lembaga keuangan syariah. Pelaporan sosial dalam perspektif Islam merupakan suatu proses pengidentifikasian, penyediaan, dan upaya mengkomunikasikan informasi-informasi sosial dan aktivitas lain yang terkait yang sejalan dengan kebutuhan informasi bagi pengambil keputusan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan umat dalam arti yang luas, untuk meningkatkan transparansi pengelolaan bisnis dihadapan umat Muslim, dan untuk mencapai Keridhaan Allah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi user dan preparer laporan keuangan terhadap praktik pelaporan sosial perbankan Islam di Malaysia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Malaysia merupakan negara yang terdepan dalam pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah. Penelitian ini secara khusus menguji beberapa aspek antara lain: (a) tujuan pelaporan sosial dalam perspektif Islam; (b) informasi-informasi yang cukup penting dan relevan bagi para stakeholdernya. Penelitian ini melibatkan beberapa kelompok responden antara lain: akuntan di perbankan Islam, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), akademisi akuntansi

Muslim, dan para deposan yang diwakili oleh mahasiswa pasca sarjana. Penelitian ini menemukan bahwa para stakeholder di Malaysia memiliki pandangan positif terhadap praktik pelaporan sosial dalam perspektif Islam. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan laporan perbankan Islam dan untuk meningkatkan kepedulian para regulator dan manajemen perbankan Islam terhadap fungsi sosial yang dijalankan khususnya di Malaysia dan secara lebih luas industri keuangan syariah di seluruh dunia.

Kata Kunci: *perbankan Islam, pelaporan sosial dalam perspektif Islam, pertanggungjawaban*

PENDAHULUAN

Perbankan Islam merupakan lembaga Islam yang paling menarik karena lembaga tersebut tumbuh paling cepat dalam sistem keuangan Islam (Maali et al, 2006). Perbankan Islam merupakan lembaga keuangan yang menyediakan produk-produk keuangan yang tidak melanggar *Syariah*. Dalam kegiatannya, perbankan Islam juga berhubungan dengan banyak pihak termasuk para stakeholder. Hasan (2008) menyatakan bahwa komponen stakeholder tidak hanya mengacu kepada pemegang saham tetapi juga melibatkan pihak yang tidak secara langsung berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan seperti karyawan, nasabah, pelanggan, dan Dewan Pengawas *Syariah* (DPS). DPS sangat penting karena mereka berperan untuk menasihati dan mengawasi operasi perusahaan untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip *Syariah*.

Sulaiman (2005) menyatakan bahwa individu, atas nama perusahaan, juga seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat walaupun akuntabilitas utamanya adalah untuk Allah. Dengan demikian, stakeholder perbankan Islam sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak informasi tentang kegiatan operasional perbankan. Hal ini dapat disediakan melalui berbagai media seperti laporan tahunan, *newsletter*, dan informasi dalam situs resmi. Sulaiman (2005) juga mencatat bahwa aspek sosial adalah salah satu elemen penting dalam pelaporan perusahaan berbasis Islam karena dapat memberikan informasi tentang dampak sosial kegiatan perusahaan kepada masyarakat.

Karim (1999) mengatakan bahwa perbankan Islam didirikan dengan amanah untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan *Syariah*. Akuntabilitas perbankan Islam

sebagian dapat ditunjukkan oleh penyampaian dalam laporan tahunan baik dari aspek ekonomi dan sosial. Namun demikian, aspek ekonomi masih menjadi isu utama di sebagian besar penelitian sebelumnya (Maali et al., 2006:266). Sementara aspek sosial juga penting karena perbankan Islam telah digambarkan memiliki "wajah sosial" (Mashhour, 1996: 33). Ini berarti yang seharusnya mereka lakukan adalah menjaga lingkungan mereka dan masyarakat di sekitar. Selain itu, perbankan Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada para pemegang saham saja, tetapi juga masyarakat secara lebih luas. Maali et al. (2006) mengeksplorasi sifat dan tingkat pelaporan sosial oleh perbankan Islam dari 29 *full-fledge Islamic bank* di 16 negara. Mereka menemukan bahwa isu-isu sosial belum menjadi perhatian mereka. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban dalam perspektif Islam karena perbankan Islam seharusnya menyediakan informasi yang relevan tentang kegiatan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi kebutuhan pelaporan sosial oleh perbankan Islam dari perspektif *stakeholders* tertentu di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang sangat progresif dalam upaya pengembangan perbankan Islam (Schmith, 2007). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa isu tentang pelaporan sosial oleh perbankan Islam di Malaysia dengan meneliti persepsi empat kelompok yang berbeda, seperti akuntan, akademisi, deposan, dan anggota Dewan Pengawas *Syariah* (DPS) tentang dua hal, yaitu: pertama, tujuan utama pelaporan sosial dari perspektif Islam; dan kedua, jenis informasi pelaporan

sosial dari perspektif Islam yang seharusnya diungkapkan oleh perbankan Islam bagi para penggunanya.

Pelaporan sosial oleh perbankan Islam menjadi topik utama dalam penelitian ini karena beberapa alasan: *Pertama*, masyarakat Muslim perlu sebuah model baru perbankan Islam yang melayani dengan lebih adil dan mudah untuk diakses. *Kedua*, telah banyak studi pada perusahaan-perusahaan barat yang fokus pada penyampaian tanggung jawab sosial perusahaan sejak lama (misalnya Gray, Owen, dan Maunders (1987), Guthrie dan Parker (1989), Ness dan Mirza (1991), Williams dan Pei (1999), Depoers (2000), dan Woodward, Edwards, dan Birkin (2001)). Hal ini menarik karena biasanya perusahaan-perusahaan barat lebih memperhatikan aspek-aspek ekonomi daripada aspek sosial (Haniffa, 2002). Penelitian dalam penyampaian tanggung jawab sosial perusahaan akan membuat perusahaan menjadi lebih sadar akan pentingnya penyampaian sosial untuk peningkatan citra dan kinerja mereka. Karena itu, Perbankan Islam, sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen untuk melaksanakan fungsi ganda pada aspek ekonomi dan sosial secara bersamaan, seharusnya lebih baik dari lembaga-lembaga keuangan konvensional. *Ketiga*, Malaysia merupakan salah satu negara terkuat dalam industri keuangan Islam di dunia (*Islamic Finance Asia*, 2008). Namun, kemampuan Malaysia dalam mendorong sistem keuangan Islam seharusnya seimbang dengan pertumbuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat karena industrinya telah mencapai hampir posisi matang dalam dunia keuangan *Syariah*. Wilson (2001) berpendapat bahwa masalah tanggung jawab sosial dan etika perbankan adalah sangat relevan bagi mereka yang terlibat dalam perbankan dan keuangan *Syariah* karena pada dasarnya, lembaga ini dibentuk dengan semangat wahyu ilahi. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut seharusnya mampu menempatkan tanggung jawab sosial sebagai komponen inti dari keberhasilan operasinya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka laporan sosial dari perspektif Islam mungkin

dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki sistem perbankan Islam dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *Syariah*. Hal tersebut telah memotivasi penelitian ini untuk mengeksplorasi persepsi stakeholder tentang pelaporan sosial oleh perbankan Islam. Dalam rangka memberikan evaluasi yang lebih baik, peneliti akan memperbaiki dan memodifikasi *benchmark* penyampaian sosial yang diusulkan oleh Maali et al. (2006) sehingga, standarnya akan lebih sesuai untuk konteks dan kondisi perbankan Islam di Malaysia. Akhirnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan laporan perbankan Islam.

Perkembangan Perbankan Islam

Perbankan Islam diinisiasi sebagai respon atas sistem ekonomi modern yang dibangun berdasar sistem berbasis bunga (Ahmad, 2000). Oleh karena itu, lembaga tersebut menawarkan model yang mencoba untuk meniadakan komponen bunga dalam aktivitasnya. Perkembangan perbankan Islam dimulai dengan diskusi oleh beberapa intelektual Muslim, *Ulama* dan *Fuqaha* tentang kritik terhadap bunga, kapitalisme, dan imperialisme serta sistem ekonomi dan politiknya dan menyarankan sistem alternatif yang menawarkan lebih banyak keadilan dan menciptakan kesejahteraan. Diskusi tersebut dilanjutkan dengan tindakan nyata seperti pendirian *Islamic Development Bank (IDB)* dan lembaga penelitiannya, *the Islamic Research and Training Institute (IRTI)*. Beberapa negara lain juga memulai pendirian perbankan Islam misalnya Pakistan (1950-an), Mesir (1963), Malaysia (1963) dan Dubai (1975). Saat ini, perbankan Islam tumbuh sebesar 10-15% per tahun dan diindikasikan pertumbuhan ini tetap konsisten di masa mendatang (Čihák dan Hesse, 2008). Perbankan Islam telah berkembang menjadi lebih dari 300 lembaga yang tersebar di 75 negara, termasuk Amerika Serikat melalui perusahaan seperti Michigan berbasis Bank University, serta tambahan 250 reksadana yang sesuai dengan prinsip *Syariah*.

Kegiatan Perbankan Islam melandas-

kan diri pada *Syariah* sebagai dasar untuk semua aspek kehidupan dan tidak memisahkan antara urusan agama dan hal-hal duniawi. Sebagai contoh, aspek yang paling penting dari ajaran Islam adalah larangan riba dan persepsi uang sebagai alat tukar dan sarana untuk melaksanakan kewajiban keuangan, tetapi bukan merupakan komoditas. Dengan demikian, perbankan Islam mengusung konsep berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan konsep Islam dimana "keuntungan adalah bagi mereka yang menanggung risiko". Perbankan Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai sarana investasi karena uang hanya dapat dimanfaatkan oleh sektor-sektor produktif.

Statement of Financial Accounting (SFA) No. 2 AAOIFI tentang *the Concepts of Financial Accounting for Islamic banks and Financial Institutions* paragraf 10-16 menjelaskan peran perbankan Islam adalah sebagai (a) pengelola investasi, (b) investor, (c) penyedia jasa keuangan, dan (d) penyedia layanan sosial. Lebih jauh, paragraf 15 menjelaskan bahwa perbankan Islam bisa menunjukkan peran sosialnya melalui pemberian dana *Qardhul Hasan* atau dana *Zakat* serta dana amal lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah*. Konsep perbankan Islam juga mewajibkan bank untuk memainkan peran dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, fungsi ini bisa membuat perbankan Islam menjadi bermanfaat bagi masyarakat terutama sebagai sarana distribusi kekayaan.

Anas dan Mourina (2009) menegaskan bahwa Islam menekankan konsep tanggung jawab sosial dan menjelaskan pentingnya peran *Zakat* dan *Qardhul Hasan* dalam kehidupan. *Zakat* mendorong umat Islam untuk memurnikan kekayaan individu dengan mendistribusikan ke kelompok masyarakat tertentu seperti orang miskin dalam rangka redistribusi pendapatan dan kekayaan diantara mereka untuk memberikan kesetaraan dan keadilan standar hidup. Sementara *Qardhul Hasan* adalah pemberian pinjaman dengan pengembalian tanpa imbalan dimana ajaran Islam mendorong Muslim untuk menyediakan

modal lunak bagi rakyat miskin. Anas dan Mourina (2009) menunjukkan bahwa kontrak ini dapat memfasilitasi masyarakat miskin untuk menciptakan lapangan kerja, pasar baru dan usaha bisnis dengan menggunakan jasa-jasa mereka, keterampilan dan keahlian. Dengan demikian, masalah pengangguran dapat terhapus dari masyarakat. Iqbal dan Mirakhor (2007) mengkategorikan *Qardhul Hasan* sebagai kontrak kesejahteraan sosial, yang melibatkan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi yang kurang beruntung. Oleh karena itu, kedua jenis kegiatan sosial seharusnya didorong untuk memperkuat peran perbankan Islam di masyarakat serta mendorong keunikan kegiatan operasi perbankan Islam dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Maali et al. (2003) menegaskan bahwa bisnis yang berdasarkan ajaran Islam seharusnya mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk *umat* (masyarakat Islam) karena mereka memiliki hak untuk mengetahui kondisi organisasi sebagai bagian dari *pihak* yang dapat mempengaruhi kesejahterannya. Al-Mograbi (seperti dikutip dari Maali et al, 2003) menambahkan bahwa umat Islam bertanggung jawab atas tindakan mereka dan seharusnya memperhitungkan ini tanggung jawab terhadap masyarakat di mana mereka tinggal karena tindakan mereka mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, perbankan Islam seharusnya lebih baik untuk mengungkapkan mereka kegiatan sosial kepada masyarakat sehingga masyarakat akan memahami peran perbankan Islam untuk kemajuan semua pihak, terutama *umat* Islam.

Jadi, sangat jelas bahwa fungsi bank Islam sangat berbeda dengan fungsi bank konvensional. Oleh karena itu, penting bagi perbankan Islam untuk mengembangkan konsep-konsep yang sesuai dengan ajaran Islam karena konsep-konsep yang dikembangkan oleh akuntansi keuangan konvensional tidak dapat memenuhi fungsi perbankan Islam.

Peraturan Perbankan di Malaysia

Di Malaysia, ada dua undang-undang yang mengatur bank *Syariah* yakni; Islamic

Banking Act 1983 (IBA) dan BAFIA 1989 (Norhashimah, 2007). Sifat kedua undang-undang ini agak berbeda yaitu, *Islamic Banking Act 1983* (IBA) diberlakukan dengan tujuan mengatur perbankan Islam sedangkan BAFIA diberlakukan untuk mengatur perbankan konvensional. Selanjutnya, industri perbankan *Syariah* Malaysia memiliki 2 jenis bank *Syariah*, yaitu bank-bank komersial yang menawarkan operasi dan kegiatan perbankan *Syariah* secara penuh, dan kedua, perbankan komersial yang menawarkan sebuah skema/divisi perbankan Islam dan pada saat yang sama mengoperasikan kegiatan perbankan konvensional. Pada tanggal 4 Maret 1993, BNM memperkenalkan skema yang dikenal sebagai skema perbankan bebas bunga (*Skim Perbankan Tanpa Faedah*) di mana bank konvensional dapat menawarkan produk Bank Islam melalui divisinya (Ibrahim, 1997). Hasan (2007) berpendapat bahwa kebijakan ini memungkinkan bank konvensional banyak mendirikan divisi *Syariah* dan menunjuk para cendekiawan Muslim untuk menjadi anggota DPS. Karena itu, perbankan Islam di Malaysia dapat dikategorikan menjadi (i) *Local-Full-fledge Islamic banks*; (ii) *International Full-fledge Islamic banks*; (iii) *Local Subsidiary Islamic banks*; dan (iv) *International Subsidiary Islamic banks*.

Pelaporan Keuangan dan Sosial

Keterbukaan merupakan elemen penting dari fungsi akuntabilitas untuk lembaga keuangan *Syariah* kepada para stakeholdernya karena hal ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat tanggung jawab sosial (Dauzan, 2007). Maali et al. (2006) mengkategorikan tiga tujuan umum penyampaian tanggung jawab sosial oleh perbankan Islam, yaitu untuk (i) menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *Syariah* Islam, khususnya perlakuan adil kepada berbagai pihak, (ii) menunjukkan sejauh mana operasi bisnis telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Islam, dan (iii) membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agama mereka seperti pembayaran *Zakat*. Lebih jauh, Maali et al., (2006) mencoba

mengeksplorasi penyampaian informasi-informasi sosial di perbankan Islam terutama kategori informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Maali et al, (2006) menggunakan *content analysis* dengan menggunakan instrumen *checklist* yang terdiri dari beberapa item yang seharusnya diungkapkan dalam pelaporan sosial bank *Syariah* sebagai berikut: (a) penyampaian Opini Dewan Pengawas *Syariah*, (b) penyampaian transaksi yang melanggar *Syariah*, (c) informasi sumber dan distribusi dana *Zakat*, (d) informasi sumber dan distribusi dana *Qardhul Hasan*; (e) pelaporan kegiatan sosial lain; (f) pelaporan informasi mengenai pengembangan SDM, (g) pengungkapan fakta perlakuan terhadap nasabah yang terlambat membayar dan/ mengalami kebangkrutan, (h) pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan, dan (i) aspek keterlibatan perbankan Islam dalam pemberdayaan masyarakat. Aspek-aspek pengungkapan tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan praktek yang ada di perbankan konvensional.

Haniffa dan Hudaib (2004) meneliti 5 laporan tahunan lembaga keuangan syariah di empat negara di kawasan teluk dengan tujuan mendapatkan berbagai wawasan dan memperluas pengungkapan serta secara kritis menilai berbagai dimensi dalam laporan tahunan agar dapat memberikan kontribusi terhadap kritik atas praktek pengungkapan dalam konteks *Syariah Islamiyyah*. Mereka membuat *checklist* dengan menggunakan 8 (delapan) tema untuk meneliti laporan tahunan perbankan Islam. Tema-tema tersebut antara lain: (i) pernyataan misi dan tujuan perusahaan, (ii) pengungkapan mengenai kebijakan manajemen, (iii) pengungkapan tentang Dewan Pengawas *Syariah* (DPS), (iv) proses audit; (v) produk dan jasa, (vi) karyawan; (vii) masyarakat; dan (viii) eksistensi nilai-nilai Islam. Tema-tema tersebut selanjutnya diperluas menjadi 79 item pengungkapan dalam rangka untuk mengevaluasi kesadaran manajemen perbankan Islam terhadap isu-isu *Syariah Islamiyyah* pada laporan tahunannya.

Pada tahun 2007, Haniffa dan Hudaib mengusulkan *Ethical Identity Index (EII)* dengan mengelompokkan tema-tema analisis menjadi lima tema yang menjadi ciri khas perbankan Islam dan membedakannya dari para kompetitornya (bank-bank konvensional), sebagai berikut: (i) filosofi dan nilai-nilai yang mendasari kegiatan operasinya; (ii) penyediaan produk dan jasa yang bebas bunga, (iii) kegiatan operasi yang terbatas pada transaksi *Syariah* saja; (iv) fokus pada tujuan dan pengembangan aspek-aspek sosial, dan (v) tunduk pada keputusan DPS. Dari lima tema ini, kemudian diperluas menjadi 8 kategori dan 78 item. Metode ini mirip dengan penelitian sebelumnya. Namun demikian, sampel yang dipilih lebih luas. Selain itu, mereka menggunakan data laporan tahunan multi tahun untuk mengetahui perkembangan isi laporan tahunan tersebut.

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan MASB (*Malaysian Accounting Standards Board*) juga telah mengeluarkan beberapa ketentuan tentang penyampaian pelaporan sosial oleh perbankan Islam dan lembaga keuangan *Syariah* lain dalam rangka untuk mempromosikan kegiatan perbankan Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan membantu memelihara pengembangan pasar modal *Syariah*.

MASB telah mengeluarkan *Technical Release (TR) i-3* tahun 2009 tentang Pelaporan dan Pengungkapan Laporan Keuangan di Lembaga Keuangan *Syariah* (LKS). Beberapa elemen dari standar-standar tersebut telah meliputi aspek-aspek pelaporan dan pengungkapan aktivitas sosial seperti: (i) adanya Dewan Pengawas *Syariah* (DPS) beserta hak dan kewajibannya, (ii) kewajiban *Zakat*, dan (iii) Pendapatan dan belanja non-halal. Paragraf 34 menyatakan bahwa lembaga keuangan *Syariah* seharusnya menegaskan peran dan wewenang DPS dalam memantau kegiatan-kegiatan LKS yang berkaitan kepatuhan terhadap *Syariah*. Sementara paragraf 35 menyatakan bahwa LKS seharusnya mengungkapkan aspek pelaksanaan tanggung jawab

pemungutan dan penyaluran dana Zakat milik deposan, pemegang saham, dan lain-lain. Selanjutnya, paragraf 36 menyatakan bahwa LKS didorong untuk mencantumkan beberapa informasi yang relevan tentang sumber dana yang dilarang oleh prinsip *Syariah* seperti: (a) jumlah dan sifat pendapatan, (b) jumlah dan sifat pembiayaan; dan (c) cara mengalokasikan pendapatan non-halal (MASB, 2009). Namun, persyaratan terakhir tersebut masih bersifat sukarela.

PENGEMBANGAN PROPOSISI DAN HIPOTESIS

Studi ini ingin menunjukkan bahwa para stakeholder perbankan Islam di Malaysia menganggap bahwa pelaporan sosial dari perspektif Islam relevan untuk dipraktekkan karena akan meningkatkan transparansi tanggung jawab sosial melalui media yang relevan seperti laporan tahunan. Dengan demikian, proposisi pertama terkait dengan persepsi para stakeholder untuk tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam dalam pernyataan berikut:

P₁: Para stakeholder perbankan Islam di Malaysia perlu mengetahui bahwa pelaporan sosial dari perspektif Islam relevan untuk dipraktekkan

Selain itu, penelitian ini juga ingin menunjukkan kemungkinan perbedaan persepsi antara para stakeholder, yang terdiri dari para *user* dan *preparer* laporan keuangan, karena perbedaan dalam pengalaman mereka, latar belakang pendidikan, dan posisi mereka di bank *Syariah*. Al-Khater dan Naser (2003) menemukan bahwa latar belakang responden seperti pendidikan dan pengalaman kerja berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda. Dengan demikian, studi ini meneliti persepsi para stakeholder terhadap tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam dalam rangka untuk mengeksplorasi perbedaan persepsi di antara mereka. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini mengusulkan hipotesis pertama dalam pernyataan berikut:

H₁: Ada perbedaan persepsi yang signifikan antar stakeholder yang berbeda di perbankan Islam terhadap tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam

Kelompok penyusun laporan keuangan di perbankan Islam (*preparer*) dan pengguna (*user*) dapat memiliki perbedaan persepsi terhadap pelaporan sosial dari perspektif Islam. Pembuat laporan keuangan sebagai bagian dari perusahaan cenderung untuk meminimalkan biaya pelaporan untuk memastikan efisiensi biaya karena tujuan utama mereka adalah kinerja ekonomi. Di sisi lain, pengguna yang mewakili masyarakat mengharapkan perbankan Islam untuk memiliki akuntabilitas sosial karena keberadaan perusahaan tersebut ada di dalam lingkungan masyarakat. Dalam perspektif Islam, manajemen perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat tetapi juga akhirnya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pengguna berharap agar pelaporan sosial dari perspektif Islam dapat lebih tinggi dari stakeholder lainnya. Deegan dan Rankin (1997) juga mencatat bahwa ada harapan yang berbeda antara penyusun laporan keuangan dan pengguna dalam konteks akuntabilitas korporasi. Deegan dan Rankin (1997) menemukan perbedaan persepsi yang signifikan antara pandangan pengguna dan pembuat terhadap berbagai isu pelaporan lingkungan perusahaan.

Penelitian mengelompokkan responden menjadi dua kelompok, yaitu penyusun laporan keuangan khususnya para akuntan perbankan Islam, dan pengguna laporan keuangan yang terdiri dari anggota DPS, Akademisi Akuntansi Muslim, dan mahasiswa Pascasarjana sebagai *proxy* dari deposan. Penelitian ini kemudian mengajukan hipotesis berikut:

H₂: Ada perbedaan persepsi yang signifikan antara pengguna (*user*) dan penyusun (*preparer*) laporan keuangan perbankan Islam terhadap tujuan utama pelaporan sosial

Baydoun dan Willett (2000) berpendapat bahwa LKS seharusnya mempromosikan transparansi melalui penyampaian informasi keuangan. Namun, saat ini penelitian tentang pelaporan sosial menemukan bahwa laporan-laporan perbankan Islam tersebut, khususnya tentang pelaporan aspek-aspek sosial, masih jauh dari yang diharapkan (lihat misalnya Maali et al. (2006) dan Haniffa dan Hudaib (2004, 2007)). Masalahnya mungkin timbul karena kurangnya ketegasan penyusun standar akuntansi dan pemangku kepentingan untuk mewajibkan mereka untuk mengungkapkan laporan-laporan aktivitas sosial tersebut secara lebih luas dan terbuka. Meskipun kita tahu bahwa AAOIFI telah mengeluarkan beberapa standar pelaporan sosial dari perspektif Islam, tetapi dalam kenyataannya, masih banyak perbankan Islam yang tidak mengikutinya.

Hipotesis ini terkait dengan jenis informasi pelaporan sosial dari perspektif Islam yang seharusnya diungkapkan oleh bank Islam. Penelitian ini mengusulkan sepuluh tema pelaporan sosial dari perspektif Islam dari evaluasi studi sebelumnya (lihat Maali et al. (2006), Haniffa dan Hudaib (2002, 2004, dan 2007)). Studi ini berpendapat bahwa para stakeholder perbankan Islam perlu mengetahui bahwa informasi tentang pelaporan sosial dari perspektif Islam sangat penting untuk diungkapkan oleh perbankan Islam karena laporan ini akan meningkatkan kredibilitas perbankan Islam terhadap masyarakat dan informasi akan menguntungkan bagi para stakeholder. Sehingga mereka dapat mengevaluasi kesadaran perbankan Islam terhadap tanggung jawab sosial khususnya isu-isu yang terkait dengan prinsip-prinsip *Syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui pendapat para stakeholder tentang informasi pelaporan sosial dari perspektif Islam yang seharusnya diungkapkan oleh perbankan Islam untuk mempelajari tingkat pentingnya informasi tentang pelaporan sosial dari perspektif Islam dari perspektif stakeholder. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mengajukan proposisi sebagai berikut:

P₂: Para stakeholder perbankan Islam perlu mengetahui bahwa informasi tentang pelaporan sosial dari perspektif Islam secara signifikan penting untuk diungkapkan oleh perbankan Islam

Penelitian ini juga mengkaji kemungkinan perbedaan persepsi antara stakeholder tentang informasi yang akan diungkapkan dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam, karena responden memiliki latar belakang yang berbeda dari pendidikan, pengalaman kerja, dan posisi mereka terhadap perbankan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ada perbedaan persepsi yang signifikan antara stakeholder yang berbeda terhadap informasi yang seharusnya diungkapkan dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam

Persepsi dari penyusun dan pengguna laporan keuangan perbankan Islam bisa jadi juga berbeda karena penyusun menganggap bahwa pelaporan sosial dari perspektif Islam hanya terkait dengan bisnis utama bank *Syariah*. Informasi tambahan mengenai tanggung jawab karyawan, kegiatan sosial, dan pengembangan masyarakat bisa diungkapkan jika ada pengaruh positif terhadap organisasi. Di sisi lain, pengguna akan berpendapat bahwa bank *Syariah* seharusnya mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang pelaporan sosial dari perspektif Islam daripada organisasi konvensional. Oleh karena itu, pengguna mungkin menyetujui semua usulan dari setiap jenis informasi dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam.

Dengan demikian, berdasarkan alasan di atas, penelitian ini menguji persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan perbankan Islam terhadap informasi pelaporan sosial dari perspektif Islam yang seharusnya diungkapkan oleh perbankan Islam. Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa hipotesis yang paling relevan sebagai berikut:

H₄: Ada perbedaan persepsi yang signifikan

antara penyusun dan pengguna laporan keuangan perbankan Islam terhadap informasi yang seharusnya diungkapkan dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *proportional stratified random sampling*, dan membagi responden dalam dua kategori, yaitu kelompok pengguna (*user*) dan kelompok penyusun (*preparer*) laporan keuangan dari dalam dan luar perbankan Islam. Akuntan perbankan Islam dan anggota DPS merupakan kelompok dari dalam bank Islam, sedangkan akademisi akuntansi muslim dan Mahasiswa Pascasarjana mewakili kelompok dari luar bank Islam yang memiliki rekening di Bank Islam. Kelompok mahasiswa Pascasarjana dipilih dari program pascasarjana yang mengambil studi di *Kulliyah Economics and Managements Sciences (KENMS) International Islamic University Malaysia (IIUM)*. Jumlah Perbankan Islam yang menjadi responden adalah 18 bank, dan Akademisi Akuntansi Muslim berasal dari 12 universitas di Malaysia.

Penelitian ini mengadopsi metode survei kuesioner untuk menguji persepsi para stakeholder terhadap pelaporan sosial dari perspektif Islam oleh bank *Syariah* di Malaysia. Kuesioner ini dirancang untuk berbagai kelompok stakeholder bank *Syariah* di Malaysia. Jenis informasi penyampaian sosial dikembangkan berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya (lihat Maali et al. (2006), Haniffa dan Hudaib (2002, 2004, dan 2007)). Sepuluh jenis informasi pelaporan sosial dari perspektif Islam ditawarkan kepada responden seperti laporan DPS, pengelolaan dana *Zakat, Qardhul Hasan*, dan banyak lainnya. Model jawaban menggunakan skala likert-5. Penelitian ini juga membandingkan persepsi di antara empat kelompok stakeholder, dan antara penyusun dengan pengguna laporan keuangan. Persepsi stakeholder yang diuji dengan menggunakan *multiple respon analysis* dan beberapa uji statistik baik parametrik maupun non-parametrik seperti: ANOVA, T-Test, Kruskal-

Wallis Test, dan Mann-Whitney U Test. Sebelumnya, Uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan dan hasilnya semua instrumen valid dan reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Diskriptif

Kuesioner dikirim berdasarkan lokasi responden masing-masing. Kuesioner untuk kelompok penyusun (akuntan Bank Syariah dan DPS) dikirim melalui kantor-kantor pusat masing-masing bank *Syariah* di Malaysia. Sementara kuesioner untuk kelompok pengguna dikirim melalui dua cara yang berbeda. Kuesioner untuk Akademisi Akuntansi Muslim dikirim melalui departemen akuntansi di universitas negeri yang dipilih. Sedangkan kuesioner untuk mahasiswa Pascasarjana dikirim langsung oleh peneliti berdasarkan jadwal kursus di setiap program. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.

Pembahasan Proposisi dan Hipotesis

Proposisi 1 diuji dengan menggunakan nilai rata-rata pada item tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam. Dari tabel 2 di bawah ini menunjukkan bahwa hampir semua item memiliki nilai rata-rata di atas 4,00 (kecuali item no. 10). Oleh karena itu, H1 diterima karena responden beranggapan bahwa semua laporan relevan untuk tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam dalam rangka memenuhi tanggung jawab bank Islam kepada para stakeholder mereka. Dari 12 item tersebut, empat laporan mendominasi tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam yaitu: (a) untuk menyediakan informasi tentang produk dan jasa yang halal sebagai bentuk amanah Allah SWT, (b) mengakui

akuntabilitas sosial sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (*Ibadah*), (c) memberikan informasi yang relevan pada tanggung jawab bank Islam terhadap masyarakat, dan (d) untuk memberikan informasi tentang bagaimana bank mendapatkan keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam dari operasi mereka. Hal ini dimungkinkan karena responden seperti akuntan bank Islam dan anggota DPS sudah memiliki latar belakang pengetahuan Islam, dan responden kelompok mahasiswa pascasarjana pun memiliki pengetahuan Islam dari pendidikan mereka di IIUM.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pernyataan pelaporan sosial dari perspektif Islam dalam hal memberikan informasi yang relevan tentang kebijakan ketenagakerjaan ternyata memiliki rata-rata terendah diantara persepsi stakeholder meskipun hal ini bertentangan dengan usulan Haniffa (2002). Hal ini dimungkinkan karena responden menganggap bahwa informasi tentang kebijakan ketenagakerjaan merupakan salah satu kewajiban perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pemerintah tentang perlindungan karyawan. Oleh karena itu, responden beranggapan bahwa informasi ini cenderung sebagai persyaratan wajib, dan bukan sukarela. Selain itu, pelaporan sosial dari perspektif Islam yang dipahami oleh responden sebagai praktek sukarela yang timbul dari kesadaran eksistensi perusahaan dalam masyarakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Meskipun demikian, P1 diterima karena hampir semua item tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam dianggap relevan untuk perbankan Islam.

Tabel 1: Ringkasan Responden

No	Kelompok responden	Pembagian Kuesioner	Kuesioner yang dikembalikan lengkap dan dapat digunakan	Response Rate (%)
1	Akuntan Bank Islam (<i>Preparer</i>)	84	51	60.71
2	Pengguna Laporan Keuangan (<i>User</i>)			
	a. Anggota DPS	67	27	40.30
	b. Akademisi Akuntansi Muslim	50	32	64.00
	c. Mahasiswa pascasarjana	80	68	85.00
	Jumlah	281	178	70.92

Tabel 2: Persepsi Stakeholders tentang Tujuan Pelaporan Sosial dari Perspektif Islam (n = 178)

No	Tujuan utama Pelaporan Sosial dari perspektif Islam	Mean skor	Standar Deviasi	Kruskal-Wallis test Rank	X ²	Tingkat Signifikansi
1	Untuk memberikan informasi tentang produk dan jasa yang halal sebagai bentuk amanah Allah SWT	4.46	0.79	1	2.760	0.430
2	Untuk memberikan informasi yang relevan pada tanggung jawab bank terhadap masyarakat sekitar	4.32	0.71	3	20.254	0.000
3	Untuk memberikan informasi tentang bagaimana bank mendapatkan keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam dari operasi mereka	4.29	0.79	4	4.917	0.178
4	Untuk memberikan informasi tentang bagaimana bank mendorong tanggung jawab sosial dalam proses bisnis	4.18	0.68	7	3.733	0.292
5	Untuk memberikan informasi tentang bagaimana bank seharusnya adil kepada karyawan dan masyarakat	4.17	0.72	8	9.181	0.027
6	Untuk memberikan informasi tentang kegiatan bisnis yang dapat mempengaruhi lingkungan	4.17	0.79	9	13.138	0.004
7	Untuk mengetahui akuntabilitas sosial sebagai bentuk ibadah kepada Allah (<i>Ibadah</i>)	4.42	0.71	2	10.879	0.012
8	Untuk memberikan informasi tentang semua kegiatan halal dan haram yang dilakukan	4.28	0.81	5	1.870	0.600
9	Untuk memberikan informasi yang relevan tentang kebijakan pembiayaan dan investasi	4.26	0.85	6	3.454	0.327
10	Untuk memberikan informasi yang relevan tentang kebijakan ketenagakerjaan	3.88	0.84	12	13.473	0.004
11	Untuk memberikan informasi yang relevan pada hubungan bank dengan masyarakat	4.13	0.81	10	8.451	0.038
12	Untuk memberikan informasi yang relevan tentang penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan	4.09	0.86	11	6.385	0.094

(*Catatan:* area diarsir menunjukkan hasil yang signifikan)

Hipotesis pertama diuji dengan menggunakan Kruskal-Wallis test untuk melihat ada tidaknya perbedaan persepsi yang signifikan di antara para stakeholder. Hipotesis pertama mengkaji kemungkinan perbedaan persepsi antar stakeholder pada tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam. Tabel 3 menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi yang signifikan antara para stakeholder pada tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam ketika Chi-Square $12,681 > 7,81$ (dari table Distribusi Chi-Square untuk $df = 3$ dan tingkat signifikan 5%). Temuan ini mungkin sejalan dengan argumen Al-Khater dan Naser's (2003) bahwa latar belakang responden seperti pendidikan dan pengalaman kerja berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda.

Keempat kelompok responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka

memiliki latar belakang pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan posisi pekerjaan yang berbeda di bank Islam. Akuntan bank Islam dan anggota DPS merepresentasikan dirinya sebagai bank Islam secara langsung, sementara akademisi akuntansi Muslim dan pasca sarjana yang tidak berhubungan langsung tetapi mereka memiliki pemahaman yang cukup terhadap praktek perbankan Islam. Penelitian ini memilih para stakeholder eksternal yang mempunyai rekening di bank Islam. Hal ini untuk memastikan bahwa responden paling tidak memahami produk-produk dan operasi perbankan Islam dan juga sebagai stakeholder langsung dari bank tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa latar belakang responden akan mengakibatkan persepsi yang berbeda.

Tabel 3: Uji Beda Kruskal-Wallis tentang Tujuan Pelaporan Sosial dari Perspektif Islam di antara para Stakeholder

Group Code	N	Mean Rank
TOT_OBJ Akuntan Bank Islam	51	71.92
Anggota DPS	27	87.72
Akademisi Akuntansi Muslim	32	112.59
Mahasiswa pascasarjana	68	92.52
Jumlah	178	
Uji Statistik (Kruskal-Wallis)	TOT_OBJ	
Chi-Square	12.681	
Df	3	
Asymp. Sig.	0.005	

Tabel 3 menyajikan temuan-temuan tambahan tentang perbedaan persepsi antara stakeholder pada tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam. Tabel yang menunjukkan item yang berkontribusi pada tingkat signifikansi perbedaan dari tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam adalah item nomor 2, 5, 6, 7, 10, dan 11. Studi ini menemukan bahwa para stakeholder memiliki dampak berbeda dalam persepsi terutama atas laporan sebagai berikut: (a) memberikan informasi yang relevan pada tanggung jawab bank terhadap masyarakat, (b) untuk memberikan informasi tentang bagaimana bank seharusnya adil kepada karyawan dan masyarakat, (c) untuk memberikan informasi tentang kegiatan bisnis yang dapat mempengaruhi lingkungan, (d) untuk mengetahui akuntabilitas sosial sebagai bentuk ibadah kepada Allah (*Ibadah*), (e) untuk menyediakan informasi yang relevan tentang kebijakan ketenagakerjaan, dan (f)

untuk menyediakan informasi yang relevan pada hubungan bank dengan masyarakat.

Persepsi antara Penyusun Laporan Keuangan Bank Islam dan Pengguna terhadap Tujuan Pelaporan Sosial dari Perspektif Islam

Tabel 4 menyediakan tabel *Mann-Whitney U test* untuk menguji perbedaan persepsi antara penyusun laporan keuangan dan pengguna yang terdiri dari anggota DPS, Akademisi Akuntansi Muslim, dan mahasiswa Pascasarjana. Pengujian hipotesis memeriksa seluruh tujuan *mean ranks* untuk mengukur perbedaan persepsi antara kedua kelompok. Total nilai rata-rata masing-masing kelompok menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan ketika Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,004 (<0,05).

Tabel 4: Uji Beda *Mann-Whitney U* tentang Tujuan Pelaporan Sosial dari Perspektif Islam antara Penyusun Laporan Keuangan dan Penggunanya

Group Code	N	Mean Rank	Jumlah Ranks
TOT_OBJ Penyusun (<i>Preparer</i>)	51	71.92	3668.00
Pengguna (<i>User</i>)	127	96.56	12263.00
Jumlah	178		
Uji Statistik (Mann-Whitney U Test)	TOT_OBJ		
Mann-Whitney U	2342.000		
Wilcoxon	3668.000		
Z	-2.890		
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.004		

Temuan ini menunjukkan bahwa penyusun laporan keuangan dan pengguna berpendapat berbeda karena keterlibatan para penyusun laporan keuangan dalam operasi bank Islam lebih dari intensif dibandingkan pengguna. Namun, anggota DPS yang seharusnya secara langsung senantiasa terlibat dalam bank Islam, ternyata tidak cukup intensif. Mereka hanya terlibat terutama jika ada permasalahan *Syariah* yang perlu diselesaikan misalnya mengenai kehalalan suatu produk dan jasa. Oleh karena itu, kedua kelompok itulah yang paling mungkin memiliki perbedaan pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Al-Khater dan Naser (2003).

Selain itu, total nilai rata-rata tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam menunjukkan bahwa pengguna laporan keuangan cenderung memiliki harapan lebih tinggi daripada penyusun terhadap penyampaian isu-isu sosial oleh bank Islam. Deegan dan Rankin (1997) menunjukkan bahwa pengguna keuangan laporan menjadi lebih luas dan tidak hanya pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan seperti pemegang saham. Kelompok pengguna yang diidentifikasi dalam Laporan Perusahaan (AASC, 1975) adalah ekuitas investor, kreditor, karyawan, analis/penasihat, kelompok rekan bisnis, pemerintah dan masyarakat. Masyarakat begitu luas ruang lingkupnya termasuk; konsumen, komunitas, dan kelompok kepentingan khusus seperti partai politik. Deegan dan Rankin (1997) berpendapat bahwa kelompok pengguna perlu mengetahui dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan terhadap masyarakat mereka dan kelestarian lingkungan. Dalam kasus operasi bank Islam, pengguna perlu mengetahui bahwa akuntabilitas sosial melalui pelaporan sosial dari perspektif Islam dapat memenuhi permintaan pengguna.

Selain itu, tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah penyusun laporan keuangan perbankan Islam dan pengguna secara signifikan mempunyai perbedaan sampai batas tertentu dan akan mempengaruhi temuan penelitian. Namun, penelitian ini menguji *mean ranks* kedua kelompok yang benar-benar menunjuk-

kan persepsi rata-rata setiap kelompok responden. Dengan demikian, selisih *mean ranks* akan mencerminkan rata-rata persepsi masing-masing kelompok pada tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam.

Secara umum, hipotesis 2 diterima bahwa, penyusun laporan keuangan bank Islam dan pengguna memiliki perbedaan persepsi yang signifikan terhadap tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam walaupun ada persamaan di beberapa item dalam pembahasan sebelumnya. Penelitian sebelumnya seperti Deegan dan Rankin (1997) juga menemukan perbedaan persepsi yang signifikan antara pengguna dan penyusun tentang berbagai isu yang terkait dengan pelaporan lingkungan perusahaan. Selain itu, dua perbedaan perspektif tersebut penting untuk meningkatkan kualitas sistem pelaporan termasuk pelaporan sosial dari perspektif Islam.

Persepsi Stakeholders terhadap Informasi yang Seharusnya diungkapkan dalam Pelaporan Sosial dari Perspektif Islam

Tabel 5 menggambarkan analisis respon beberapa persepsi para stakeholder terhadap informasi yang seharusnya diungkapkan dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam. Jika setiap jawaban item mendapatkan respon > 50% dari responden, dapat disimpulkan bahwa informasi secara signifikan penting untuk diungkapkan. Tabel ini menunjukkan bahwa 8 dari 9 jawaban telah memperoleh tanggapan > 50% responden. Dengan demikian, proposisi 2 dapat diterima karena hampir semua informasi dianggap penting untuk mengungkapkan dari perspektif para stakeholder. Laporan DPS dan penyediaan informasi *Zakat* telah mendapat lebih dari 80% respon dari 178 responden. Ini merupakan penemuan penting karena kedua informasi tersebut memiliki karakteristik yang unik yang membedakan bank Islam dengan bank konvensional. Laporan DPS memberikan peran dan tindakan dalam mengawasi dan mengevaluasi operasi dari sebuah bank Islam. Sedangkan penyediaan informasi *Zakat* menggambarkan akuntabilitas bank Islam dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar *zakat* berdasarkan prinsip-prinsip *Syariah*.

Tabel 5: Persepsi Stakeholders tentang Informasi yang Seharusnya Diungkapkan dalam Pelaporan Sosial dari Perspektif Islam (N = 178)

No	Informasi dalam Pelaporan sosial dari perspektif Islam	Tanggapan		% Kasus	Peringkat
		N	Persen (%)		
1.	Laporan Dewan Pengawas <i>Syariah</i> (DPS)	155	14.5	87.1	1
2.	Ketentuan <i>Zakat</i>	150	14.0	84.3	2
3.	Kegiatan-kegiatan Sosial	128	12.0	71.9	3
4.	Transaksi Non Halal	123	11.5	69.1	4
5.	Informasi Produk	122	11.4	68.5	5
6.	Pemberdayaan masyarakat	116	10.8	65.2	6
7.	Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i>	107	10.0	60.1	7
8.	Tanggung Jawab kepada karyawan	99	9.3	55.6	8
9.	Keterlambatan pembayaran dan/ klien bangkrut	70	6.5	39.3	9
	Jumlah	1070	100		

Persepsi antara Kelompok Pengguna yang berbeda terhadap Informasi yang akan diungkapkan dalam Pelaporan Sosial dari Perspektif Islam

Tabel 6 menggambarkan analisis respon stakeholder tentang informasi yang seharusnya diungkapkan dalam Pelaporan sosial dari perspektif Islam. Aturan umum sebelum menentukan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: (a) menentukan 5 jawaban tertinggi untuk setiap kelompok responden; (b) membandingkan peringkat antara kelompok-kelompok yang berbeda. Jika semua jawaban adalah sama antar kelompok atau setidaknya 4 jawaban adalah sama, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masing-masing stakeholder tidak berbeda secara signifikan. Tabel 6 menyediakan sumber-sumber asli dari persepsi stakeholder sebelum dimasukkan ke dalam tabel peringkat seperti yang dijelaskan dalam tabel 7.

Analisis ini melibatkan 178 responden yaitu; 51 Akuntan bank Islam, 27 anggota DPS, 32 akademisi akuntansi Muslim, dan 68 mahasiswa Pascasarjana. Selain itu, tabel 7 menyediakan ringkasan persepsi-persepsi antar para stakeholder yang berbeda tentang informasi yang seharusnya diungkapkan dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam

dengan menggunakan peringkat. Tabel ini menunjukkan bahwa hanya 3 dari 5 jawaban peringkat tertinggi telah sama-sama dipilih oleh para stakeholder. Oleh karena itu, hipotesis 3 diterima karena mereka memiliki preferensi yang berbeda terhadap informasi yang seharusnya diungkapkan dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam. Namun, menarik untuk diamati bahwa informasi tentang laporan DPS, pemberian *zakat*, dan kegiatan sosial dipilih oleh semua kelompok stakeholder sebagai 5 jawaban peringkat tertinggi.

Selanjutnya, tabel 7 menunjukkan bahwa persepsi 4 kelompok responden terhadap informasi pelaporan sosial dari perspektif Islam hampir sama, karena mereka memilih empat peringkat tertinggi yang sama, yaitu: (a) laporan DPS; (b) Ketentuan *Zakat*, (c) kegiatan sosial, dan (d) transaksi non-halal. Kelompok-kelompok stakeholder lebih memilih informasi yang erat kaitannya dengan masalah kepatuhan *Syariah* terutama laporan DPS, pemberian *zakat* dan transaksi non-halal. Hal ini mungkin karena semua pihak berpikir bahwa bank Islam seharusnya memberikan perhatian lebih kepada isu-isu kepatuhan *Syariah* bukan hanya fokus pada orientasi keuntungan.

Tabel 6: Persepsi Diantara Stakeholder tentang Informasi yang Seharusnya Diungkapkan dalam Laporan Sosial dari Perspektif Islam

(N = 178; IBA = 51; DPS = 27; MAA = 32; PGS = 68)

No	Informasi dalam Pelaporan sosial dari perspektif Islam	IBA			DPS			MAA			PGS		
		Tanggapan		Pang kat	Tanggapan		Pang kat	Tanggapan		Pang kat	Tanggapan		Pang kat
		N	(%)		N	(%)		N	(%)		N	(%)	
1.	Laporan Dewan Pengawas <i>Syariah</i> (DPS)	49	17.4	1	24	14.6	1	30	13.6	1	52	12.8	2
2.	Informasi Produk	29	10.3	6	24	14.6	2	24	10.9	5	45	11.1	6
3.	Ketentuan <i>Zakat</i>	44	15.7	2	23	14.0	3	29	13.2	2	54	13.3	1
4.	Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i>	22	7.8	8	14	8.5	7	24	10.9	6	47	11.6	5
5.	Kegiatan sosial	33	11.7	3	20	12.2	5	26	11.8	3	49	12.1	3
6.	Transaksi Non-Halal	33	11.7	4	16	9.8	6	25	11.4	4	49	12.1	4
7.	Tanggung Jawab kepada karyawan	23	8.2	7	13	7.9	8	24	10.9	7	39	9.6	8
8.	Pengembangan masyarakat	32	11.4	5	21	12.8	4	22	10.0	8	41	10.1	7
9.	Keterlambatan pembayaran dan/ klien bangkrut	16	5.7	9	9	5.5	9	16	7.3	9	29	7.2	9
	Jumlah	281	100		164	100		220	100		405	100	

Tabel 7: Ringkasan Persepsi Diantara Stakeholder tentang Informasi yang Seharusnya Diungkapkan dalam Laporan Sosial dari Perspektif Islam

No	Persepsi IBA	Persepsi DPS	Persepsi MAA	Persepsi PGS
1.	Laporan DPS	Laporan DPS	Laporan DPS	Ketentuan <i>Zakat</i>
2.	Ketentuan <i>Zakat</i>	Informasi Produk	Ketentuan <i>Zakat</i>	Laporan DPS
3.	Kegiatan dan Sosial	Ketentuan <i>Zakat</i>	Kegiatan Sosial	Kegiatan Sosial
4.	Transaksi Non-Halal	Pemberdayaan masyarakat	Transaksi Transaksi Non-Halal	Transaksi Non-Halal
5.	Pemberdayaan masyarakat	Kegiatan Sosial	Informasi Produk	Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i>

Selain itu, empat informasi tersebut juga menunjukkan fitur unik dari perbankan Islam misalnya laporan DPS merupakan pertanggungjawaban anggota DPS dalam mengawasi dan memantau operasi perbankan Islam. *Kedua*, penyediaan informasi *Zakat* menggambarkan kesadaran bank Islam dalam memenuhi kewajiban membayar *Zakat*. *Ketiga*, kegiatan sosial dan amal dari perbankan Islam dapat diperlihatkan oleh manajemen dari mana sumber dana amal tersebut, untuk tujuan sosial. Akhirnya, transaksi non-halal yang dikategorikan sebagai transaksi yang tidak disengaja karena perbankan Islam tidak mungkin dapat menghindari operasi seperti itu, misalnya, bank Islam mungkin harus berurusan dengan *Letter of Credit* dengan bank konvensional dan Bank Islam diwajibkan untuk membayar bunga atas transaksi tersebut (Mohd Rizal et al 2006.). Dengan demikian, kebijakan dalam memperlakukan transaksi tersebut penting untuk diungkapkan sehingga dapat dipastikan bahwa perbankan Islam tidak

melibatkan atau mencampur aduk sumber yang sah (*halal*) dan yang melanggar hukum Islam (*haram*).

Persepsi-persepsi antara penyusun Laporan Keuangan bank Islam dan Pengguna pada Informasi yang seharusnya diungkapkan dalam Pelaporan Sosial dari Perspektif Islam

Tabel 8 menggambarkan perbandingan analisis *multiple respon* dari persepsi penyusun laporan keuangan dan pengguna informasi, yang seharusnya diungkapkan dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam. Aturan umum sebelum menentukan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: (a) menentukan 5 jawaban tertinggi untuk setiap kelompok responden, (b) membandingkan peringkat antara kelompok-kelompok yang berbeda. Jika semua jawaban adalah sama antara kelompok-kelompok atau setidaknya ada 4 jawaban adalah sama, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi para stakeholder yang berbeda tidak

memberikan perbedaan yang signifikan. Tabel 8 menyajikan sumber asli persepsi stakeholder sebelum dimasukkan ke dalam tabel ranking (peringkat) seperti yang dijelaskan dalam tabel 9.

Tabel 9 merangkum persepsi kedua kelompok responden tentang masalah ini. Tabel ini menunjukkan bahwa 4 dari 5 jawaban dengan peringkat tertinggi sama-sama dipilih oleh para stakeholder. Oleh karena itu, mereka tampaknya memiliki preferensi yang sama terhadap informasi yang seharusnya diungkapkan dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam. Selain itu, menarik untuk diamati bahwa informasi laporan DPS, pemberian *zakat*, kegiatan amal dan sosial, dan transaksi yang dilarang (*haram*) dipilih oleh semua kelompok stakeholder sebagai lima jawaban peringkat

tertinggi. Dengan demikian, hipotesis 4 ditolak karena tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap persepsi antara penyusun laporan keuangan bank *Syariah* dan pengguna.

Sebagian temuan konsisten dengan hipotesis 3 meskipun memiliki kesimpulan yang berbeda terutama empat informasi yang seharusnya diungkapkan dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam. Alasan yang mungkin untuk temuan di atas adalah bahwa baik penyusun maupun pengguna laporan keuangan mungkin berpikir bahwa empat informasi tersebut mewakili akuntabilitas sosial dari perbankan Islam untuk stakeholder mereka. Para penyusun tidak mungkin berpikir bahwa informasi tersebut akan menambah beban kepada mereka dalam menyusun laporan tahunan selama semua data pada dasarnya telah tersedia.

Tabel 8: Persepsi antara Penyusun Laporan Keuangan dan Pengguna tentang tentang Informasi yang Seharusnya Diungkapkan dalam Laporan Sosial dari Perspektif Islam (N = 178; Preparer = 51; User = 127)

No	Informasi dalam Pelaporan sosial dari perspektif Islam	Preparer			User		
		Tanggapan		Rank	Tanggapan		Rank
		N	(%)		N	(%)	
1.	<i>Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS)</i>	49	17.4	1	106	13.4	1
2.	Informasi Produk	29	10.3	6	93	11.8	4
3.	Ketentuan <i>Zakat</i>	44	15.7	2	106	13.4	2
4.	Pinjaman <i>Qard al-Hasan</i>	22	7.8	8	85	10.8	6
5.	Kegiatan Sosial	33	11.7	3	95	12.0	3
6.	Transaksi Non-Halal	33	11.7	4	90	11.4	5
7.	Tanggung Jawab kepada karyawan	23	8.2	7	76	9.6	8
8.	Pemberdayaan masyarakat	32	11.4	5	84	10.6	7
9.	Keterlambatan pembayaran dan/ klien bangkrut	16	5.7	9	54	6.8	9
Jumlah		281	100		789	100	

Tabel 9: Ringkasan Persepsi antara Penyusun Laporan Keuangan dan Pengguna tentang tentang Informasi yang Seharusnya Diungkapkan dalam Laporan Sosial dari Perspektif Islam (Menurut Ranking)

No	Persepsi dari penyusun	Persepsi Pengguna
1.	Laporan DPS	Laporan DPS
2.	Ketentuan <i>Zakat</i>	Ketentuan <i>Zakat</i>
3.	Kegiatan Sosial	Kegiatan Sosial
4.	Transaksi Non-Halal	Informasi Produk
5.	Pemberdayaan masyarakat	Transaksi Non-Halal

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi berbagai kelompok stakeholder pelaporan sosial dari perspektif Islam dari perbankan Islam di Malaysia. Empat kelompok stakeholder ambil bagian dalam survei ini, yaitu akuntan perbankan Islam, anggota DPS, Akademisi Akuntansi Muslim, dan mahasiswa Pascasarjana sebagai *proxy* deposan. Secara keseluruhan, temuan mengungkapkan bahwa para stakeholder perbankan Islam di Malaysia memiliki pandangan positif terhadap pelaporan sosial dari perspektif Islam. Tiga temuan penelitian yang umumnya menunjukkan pandangan positif sebagai berikut: *Pertama*, responden beranggapan bahwa semua laporan adalah relevan untuk tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam. Temuan ini juga telah mewakili pandangan mereka tentang pelaporan sosial dari perspektif Islam yang relevan untuk dipraktekkan dalam rangka memenuhi tanggung jawab perbankan Islam kepada para stakeholder mereka.

Kedua, para stakeholder mempersepsikan bahwa semua informasi yang diusulkan dalam penelitian ini dianggap penting untuk diungkapkan dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam, seperti: laporan DPS, pemberian *zakat*, kegiatan sosial, transaksi non-halal, informasi produk dan jasa, pemberdayaan masyarakat, pinjaman *Qardhul Hasan*, tanggung jawab kepada karyawan, dan keterlambatan pembayaran oleh nasabah dan/klien yang mengalami kebangkrutan. Temuan ini dapat memperkuat temuan penelitian sebelumnya (Maali et al. 2006 Haniffa dan Hudaib, 2004, 2007; Othman et al 2009.) meskipun ini lebih mempelajari praktek-praktek penyampaian pelaporan sosial dari perspektif Islam, daripada memeriksa persepsi stakeholder pada Pelaporan Sosial dari Perspektif Islam.

Haniffa (2002) menguraikan dua kemungkinan tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam yang difokuskan untuk menunjukkan akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat, dan untuk meningkatkan transparansi kegiatan usaha terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas sosial. Temuan

tersebut menunjukkan bahwa para stakeholder yang dipilih menganggap bahwa tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam didominasi oleh semangat memenuhi akuntabilitas kepada Allah. Banyak literatur yang telah membahas secara luas pandangan dunia Islam yang dapat mempengaruhi manusia dan masyarakat dalam melakukan tindakan mereka (lihat Al-Faruqi, 1982; Chapra, 1993; Mohamed Aslam, 1997; Abdul Rahim, 2003; dan Sulaiman, 2005). Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa persepsi para stakeholder cocok dengan tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam yang sebagian besar mengemukakan ketaatan kepada Allah.

Namun, persepsi di antara stakeholder pada tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam menunjukkan perbedaan. Alasan yang mungkin mendasari perbedaan-perbedaan ini secara signifikan adalah latar belakang responden yang berbeda, seperti pendidikan dan pengalaman kerja (lihat Al-Khater dan Naser, 2003). Selain itu, perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa masalah seperti tanggung jawab perbankan Islam untuk masyarakat sekitar dan masyarakat, akuntabilitas kepada Tuhan, kebijakan ketenagakerjaan, dan efek dari bisnis tentang kelestarian lingkungan.

Studi ini juga menemukan bahwa persepsi penyusun laporan keuangan dan pengguna terhadap tujuan pelaporan sosial dari perspektif Islam juga berbeda. Alasan yang layak untuk itu adalah bahwa frekuensi keterlibatan yang berbeda dalam bisnis perbankan Islam antara penyusun laporan keuangan dan anggota DPS. Namun, latar belakang yang berbeda juga dapat berkontribusi pada perbedaan seperti yang disebutkan oleh Al-Khater dan Naser (2003).

Para stakeholder tampaknya menyetujui semua informasi yang diusulkan untuk pelaporan sosial dari perspektif Islam penting untuk diungkapkan. empat kelompok responden memilih peringkat yang sama pada empat jenis informasi berikut: (a) laporan DPS, (b) ketentuan *zakat*, (c) kegiatan sosial, dan (d) transaksi non-halal. Alasan yang mungkin adalah bahwa para stakeholder

menganggap bahwa bank Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, informasi pelaporan sosial dari perspektif Islam memiliki karakteristik yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ada dua isu penting yang relevan untuk dibahas sebagai elemen penting pelaporan sosial dari perspektif Islam yaitu laporan DPS dan manajemen pengelolaan *zakat*. Laporan DPS mewakili akuntabilitas anggota DPS dalam pemantauan dan pengawasan perbankan Islam untuk memastikan bahwa operasi bank-bank Islam sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah*. Namun, pada praktiknya saat ini di Malaysia menunjukkan bahwa laporan DPS masih minim dalam praktek penyampaiannya, karena kekurangan persyaratan hukum dan rendahnya insentif dari regulator (Besar et al 2009). Informasi lainnya adalah ketentuan *zakat* sebagai bentuk ketaatan Muslim kepada Allah. Dengan demikian, peran bank Islam dalam memenuhi kewajiban *zakat* akan meningkatkan posisi mereka sebagai lembaga-lembaga Islam yang mempromosikan ajaran Islam dan kemajuan *umat* Muslim.

Keterbatasan Penelitian

Karena sifat penelitian dan beberapa kendala, studi ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: *Pertama*, penelitian ini hanya berfokus pada persepsi stakeholder terhadap pelaporan sosial dari perspektif Islam oleh perbankan Islam di Malaysia. Oleh karena itu, hasilnya tidak boleh digeneralisir bagi semua institusi Islam di Malaysia. Selain itu isu pelaporan sosial dari perspektif Islam dibahas dalam survei kuesioner yang terbatas pada pengembangan dari penelitian sebelumnya seperti Haniffa dan Hudaib (2004, 2007), Maali et al. (2006), Mohd Rizal et al. (2006) dan Al-Khater dan Naser (2003). Oleh karena itu, lingkup pelaporan sosial dari perspektif Islam tidak mungkin mencakup semua aspek yang mungkin juga relevan untuk dibahas.

Kedua, penelitian ini berfokus pada empat kelompok stakeholder perbankan Islam yaitu: akuntan bank Islam, anggota DPS, akademisi akuntansi Muslim, dan mahasiswa

Pascasarjana. Penentuan kelompok responden mungkin tidak mewakili stakeholder perbankan Islam lainnya, misalnya investor, para pemegang saham, nasabah, regulator, dan para amil *zakat*. Selanjutnya, metode sampling sampai batas tertentu akan mempengaruhi subjektivitas kesimpulan. Namun demikian, upaya untuk menggali persepsi para stakeholder dapat bermanfaat untuk membandingkan perspektif Islam pelaporan sosial terhadap praktek konvensional.

Ketiga, studi ini mengasumsikan bahwa media paling kredibel untuk melaporkan semua aspek kegiatan perbankan Islam adalah sebuah laporan tahunan. Pada kenyataannya, perbankan Islam juga mengungkapkan kegiatan dan akuntabilitas mereka melalui berbagai media, misalnya media cetak (misalnya surat kabar dan buletin), media elektronik (misalnya televisi dan radio) dan internet (misalnya situs perusahaan). Dengan demikian, media yang lebih luas akan memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas juga.

Penelitian ini juga merumuskan beberapa saran untuk penelitian mendatang sebagai berikut: *pertama*, studi selanjutnya dapat meningkatkan lingkup studi khususnya investigasi persepsi stakeholder dari pelaporan sosial dari perspektif Islam di negara-negara lain yang juga berfokus pada pengembangan sistem keuangan Islam seperti Pakistan, Bangladesh, Indonesia, dan Bahrain. Selain itu, studi lebih lanjut juga bisa meningkatkan responden dengan kelompok-kelompok stakeholder lain seperti para investor, para pemegang saham, nasabah, regulator, dan para amil *zakat*. Mudah-mudahan, perbaikan penelitian ini memberikan perspektif lain pada persepsi pelaporan sosial dari perspektif Islam.

Kedua, studi mendatang dapat memperbaiki metodologi penelitian khususnya peningkatan instrumen penelitian dan proses penelitian. Instrumen penelitian dapat ditingkatkan dengan menambah beberapa isu yang relevan yang seharusnya dibahas dalam pelaporan sosial dari perspektif Islam. Sementara proses penelitian dapat ditingkat-

kan dengan mengusulkan wawancara dan diskusi kelompok fokus dalam program untuk mendapatkan masukan yang berharga untuk meningkatkan praktek-praktek pelaporan sosial dari perspektif Islam oleh perbankan Islam.

Kontribusi Dan Implikasi Penelitian

Karena penelitian yang terbatas terhadap pelaporan sosial dari perspektif Islam khususnya dari sudut pandang para stakeholder, studi ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan laporan perbankan Islam seperti: *Pertama*, untuk memberikan bukti tambahan pada persepsi para stakeholder terhadap pelaporan sosial dari perspektif Islam terutama oleh perbankan Islam di Malaysia. Tanggapan positif dari para stakeholder akan bermanfaat bagi regulator dan manajemen bank *Syariah* untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial, terutama dari perspektif Islam.

Kedua, untuk memperkuat keunikan perbankan Islam dibandingkan dengan bank konvensional dengan mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dan agama melalui kegiatan sosial dan akuntabilitas perusahaan yang ditampilkan di berbagai media seperti; media cetak, media elektronik, dan Internet. Temuan penelitian menunjukkan bahwa stakeholder mempersepsikan pelaporan sosial dari perspektif Islam dianggap penting untuk dilakukan oleh perbankan Islam. Demikian pertemuan antara harapan dan prakteknya saat ini akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas perbankan Islam terhadap masyarakat.

Ketiga, untuk memberikan hasil yang dapat digunakan untuk meningkatkan persyaratan penyampaian pelaporan sosial dari perspektif Islam bagi bank Islam. Hal ini penting karena peneliti mengasumsikan bahwa regulasi dalam kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat oleh perbankan Islam belum memadai. Selain itu, ini juga dapat mendorong pembuat standar akuntansi untuk memberikan perhatian lebih pada pelaporan sosial dari perspektif Islam.

REFERENSI

- AAOIFI. (2001). *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Abdul Rahim, A.R. (1998). "Issues in corporate accountability and governance: an Islamic perspective". *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 15(1), 55-69.
- Abdul Rahim, A. R. (2003). "Ethics in accounting education: contribution of Islamic principle of *Maslahah*". *IJUM Journal of Economics and Management*, 11(1), 31-49.
- Ahmad, K. (2000). "Islamic finance and banking: the challenge and prospects". *Review of Islamic Economics*, 9, 57-82.
- Akhyar, M. A. dan Noraini, M. A. (2009, October 5). *Qardhul Hasan*, the forgotten product in Islamic banking? *The Malaysian Reserve*, p.31.
- American Accounting Association. (1975). Report of the committee on social costs. *Accounting Review Supplement*, pp. 51-89.
- Anas, E. dan Mourina, B. A. (2009). "Ethical investment and social responsibilities of the Islamic banks". *International Business Research*, (2)2, 123-130.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. Herdon: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Khater, K. dan Naser, K. (2003). "User' perceptions of corporate social responsibility and accountability: evidence from an emerging economy". *Managerial Auditing Journal*, (18)6/7, 538-548.
- Bank Negara Malaysia. (2004). *Guidelines on the Governance of Shariah Committee*

- for the Islamic Financial Institutions. Kuala Lumpur: BNM.
- Bank Negara Malaysia. (2005). *Guidelines on Financial Reporting for Licensed Islamic Bank*. Retrieved February 13, 2009 from <http://www.bnm.gov.my/>.
- Baydoun, N. dan Willet, R. (1997). "Islamic ethical issues in the presentation of financial information". *Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective Journal*, 1(1).
- Baydoun, N. dan Willet, R. (2000). "Islamic corporate reports". *ABACUS*, (36)1, 71-90.
- Besar, M. H. A. H., Sukor, M. E. A., Muthalib, N. A. dan Gunawa, A. Y. (2009). "The practice of *Shariah* review as undertaken by Islamic banking sector in Malaysia". *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 294-306.
- Chapra, U. (1992). *Islam and Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, U. (1993). *Islam and Economic Development*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.
- Chapra, U. (1993). *Prohibition of Interest: Does It Make Sense?*. Durban: Islamic Da'wah Movement.
- Chapra, U. dan Khan, T. (2000). *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Čihák, M. dan Hesse, H. (2008). *Islamic banks and financial stability: An empirical analysis*. Retrieved August 30, 2009, from <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0816.pdf>
- Coakes, S. dan Steed, L. (2007). *SPSS: Analysis Without Anguish: Version 14.0 for Windows*. Queensland: John Wiley dan Sons.
- Cooper, D. R. dan Schindler, P. S. (2008). *Business Research Methods* (10th edn). New York: McGraw Hill.
- Dapoers, F. (2000). "A cost-benefit study of voluntary disclosure: some empirical evidence from French listed companies". *European Accounting Review*, 9(2), 245-263.
- Deegan, C. dan Rankin, M. (1997). "The materiality of environmental information to users of annual reports". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 10(4), 562-583.
- El-Ashker, A. A. (1987). *The Islamic Business Enterprise*. London: Croom Helm.
- Farook, S. (2007). "On corporate social responsibilities of Islamic financial institutions". *Islamic Economic Studies*, 15(1), 31-46.
- Gray, R., Owen, D., dan Maunders, K. (1987). *Corporate social reporting: accounting and accountability*. London: Prentice-Hall.
- Guthrie, J. E. dan Parker, L. D. (1989). "Corporate social reporting: a rebuttal of legitimacy theory". *Accounting and Business Research*, 9(76), 343-352.
- Hamat, M. (1994, January 25-26). *Accounting system, needs for accounting standards and the implications of Islamic banking on the current tax laws*. Paper presented at the Conference of Managing and Implementing Dual Banking System.
- Hamim, S. A. M., Abdullah, N., dan Alhabshi, S. M. (2008). "Efficiency and competition of Islamic banking in Malaysia". *Journal of Humanomics*, 24(1), 28-48.
- Haniffa, R. dan Hudaib, M. (2001). A conceptual framework for Islamic accounting: the shariah paradigm. *A Working Paper in International Conference on Accounting, Auditing and Finance, Palmerstone North, New Zealand*.
- Haniffa, R. (2002). "Social responsibility disclosure: an Islamic perspective". *Indonesian Management and Accounting Research*, 1(2).

- Haniffa, R. dan Hudaib, M. (2004). Disclosure practices in Islamic financial institutions. *Working paper series of the Bradford University School of Management*.
- Haniffa, R. dan Hudaib, M. (2007). "Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports". *Journal of Business Ethics*, 76, 97-116.
- Harahap, S. S. (2003). "The disclosure of Islamic values - annual report: the analysis of bank muamalat Indonesia's annual report". *Managerial Finance*, 29(7), 70-89.
- Hasan, Z. (2008, July 3-4). *Corporate governance from Western and Islamic perspectives*. A paper presented at the Annual London Conference on Money, Economy and Management, in Imperial College, South Kensington, United Kingdom.
- Hasan, Z. (2007, January 3-6). *Shariah governance in the Islamic financial institutions in Malaysia*. A paper presented in The 2007 Winter Global Conference on Business and Finance, South Padre Island, Texas.
- Ibrahim, A. (1997). "Legal framework of Islamic banking". *IKIM Law Journal*, 1(1).
- Ingram, R. (1978). "An investigation of the information content of (certain) social responsibility disclosure". *Journal of Accounting Research*, 18(2), 614-622.
- Ingram, R. dan Frazier, K. (1980). "Environmental performance and corporate disclosure". *Journal of Accounting Research*, 18(2), 614-622.
- Islamic Finance Asia. (2008). *What's next for Malaysia?* Retrieved January 4, 2010, from <http://www.islamicfinanceasia.com/Supplement1.php>
- Iqbal, Z. dan Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley dan Sons.
- Karim, R. A. A. (1999). Accounting in Islamic financial institutions. *Accounting and Business Magazines*, July/Agustus 1999.
- Maali, B., Casson, P., dan Napier, C. (2003). Social reporting by Islamic banks. *Discussion Papers in Accounting and Finance, University of Southampton*.
- Maali, B., Casson, P., dan Napier, C. (2006). "Social reporting by Islamic banks". *ABACUS*, 42(2), 266 – 289.
- MASB. (2004). *MASB Standard i-1 Presentation of Financial Statements of Islamic Financial Institutions*. Kuala Lumpur: Malaysian Accounting Standard Board.
- Maignan, I., Ferrell, O. C., dan Hult, G. T. M. (1999). "Corporate citizenship: cultural antecedents and business benefits". *Journal of the Academy of Marketing Science*, 27(4), 455-469.
- Malaysian Islamic Banking Act 1983
- Mashhour, N. (1996). *Social and solidarity activity in Islamic banks*. International Institute of Islamic Thought.
- Mohamed Aslam, M. H. (1997). "Islam, the Islamic worldview, and Islamic economics". *IIUM Journal of Economics and Management*, 5(1), 39-65.
- Mohd Rizal, M., Rusnah, M., dan Kamaruzaman, N. (2006). "Corporate social responsibility disclosure: a Tawhidic approach". *Jurnal Syariah*, 14(1), 125-142.
- Ness, K. dan Mirza, A. (1991). "Corporate social disclosure: a note on a test of agency theory". *British Accounting Review*, 23(3), 211-218.
- Nik Norzrul Thani. (2001), *Legal Aspects of Malaysian Islamic financial Systems*. Kuala Lumpur: Sweet and Maxwell Asia.
- Norhashimah, M. Y. (2007). Legal aspects of

- Islamic banking: Malaysian experience. In S. S. Ali dan A. Ahmad (Eds.), *Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues* (pp. 215-238). Jeddah: IRTI - IDB.
- Nur Barizah, A. B. (2007). "A Zakat accounting standard (ZAS) for Malaysian companies". *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(4), 74-92.
- Othman, R., Azlan, M. T., dan Ghani, E. K. (2009). "Determinants of Islamic social reporting among top *Shariah*-approved companies in Bursa Malaysia". *Research Journal of International Studies*, 12, 4-20.
- Pallant, J. (2001). *SPSS: Survival Manual*. Buckingham: Open University Press.
- Roberts, R. (1992). "Determinants of corporate social responsibility disclosure". *Accounting, Organization and Society*, 17(6), 595-612.
- Sadeq, A. M. (2002). "Waqf, perpetual charity and poverty alleviation". *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135-151.
- Schmit, S. (2007). *Islamic banking experiencing rapid growth*. Retrieved February, 10, 2008, from [http://www.ita.doc.gov/td/finance/publications/Islamic Banking. pdf](http://www.ita.doc.gov/td/finance/publications/Islamic%20Banking.pdf)
- Schmith, S. (2008). *Trend in Islamic-finance regulation*. Retrieved February 13, 2008, from http://www.ita.doc.gov/td/finance/publications/Islamic_Regulatory_2008.pdf
- Sekaran, U. (2003). *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley dan Sons.
- Shahul Hameed, M. I. (2009). *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Shahul Hameed, M. I. dan Yaya, R. (2003, July 28-29). *The future of Islamic corporate reporting: lessons from alternative western accounting reports*. Paper accepted for the International Conference on Quality Financial Reporting and Corporate Governance.
- Shahul Hameed, M. I., Wirman, A., Alrazi, B., Mohamed-Nor, M. N., dan Pramono, S. (2004, April 19-21). *Alternative disclosure and performance measures for Islamic banks*. Paper presented at the second International Conference on Administrative Sciences, King Fahd University of Petroleum and Minerals.
- Shariah Finance Watch*. (2008). *Islamic banking is the fastest-growing segment of world finance*. Retrieved August 3, 2008, from <http://shariahfinancewatch.wordpress.com/2008/06/13/islamic-banking-is-the-fastest-growing-segment-of-world-finance-or-houston-we-have-a-problem/>
- Sulaiman, M. (2005). *Islamic Corporate Reporting: Between the Desirable and the Desired*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Sulaiman, M. dan Radziah, A. L. (2005). Corporate reporting for Islamic banks: between idealism and pragmatism. In B. Shanmugam, V. Perumal, dan A. H. Ridzwa (Eds.), *Issues in Islamic Accounting* (pp. 113-122). Serdang: Universiti Putra Malaysia Press.
- Tabachnick, B. G. dan Fidell, L. S. (2001). *Using Multivariate Statistics* (4th ed.). USA: Allyn and Bacon.
- Williams, S. dan Pei, C. (1999). "Corporate social disclosure by listed companies on their web sites: an international comparison". *The International Journal of Accounting*, 34(3), 389-397.
- Wilson, R. (2001). Business ethics: Western and Islamic perspectives. In. A. M. Sadeq, *Ethics in Business and Management: Islamic and Mainstream Approach*, London: Asean Academic Press.
- Woodward, D., Edwards, P., dan Birkin, F. (2001). "Some evidence and executives views of corporate social

responsibility". *British Accounting Review*, (33)3, 357-397.